

PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PENINGKATAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Yogyakarta)

Oleh: Musarofah dan Dr. Nasiwan, M.Si./Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum,
Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Yogyakarta
pelangimalam202@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Peranan DPC PDI Perjuangan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Yogyakarta. 2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh DPC PDI Perjuangan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Yogyakarta. 3) Upaya yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan untuk mengatasi kendala-kendala peningkatan partisipasi politik perempuan di Kota Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari informan yang sesuai dengan situasi yang sedang diteliti dan penentuannya menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah Danang Rudiymoko selaku ketua DPC PDI Perjuangan, Darini selaku wakil ketua bidang perempuan dan anak, Suryani selaku anggota legislatif perempuan dari DPC PDI Perjuangan, Purwandari selaku calon anggota legislatif yang tidak terpilih dalam pemilu legislatif 2014 dan Florentina Afra Suwartina selaku kader perempuan dari DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Pengujian keabsahan data menggunakan *cross check data*. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, *display data* dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan DPC PDI Perjuangan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Yogyakarta melalui militansi struktural, diskusi, pelatihan kepemimpinan, seminar, simulasi menulis *press release*, undangan media/*broadcast*, *public speaking*, pelatihan *door stop interview*, *press conference*, pelatihan kampanye dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat serta lembaga pemerintah. 2) Kendala-kendala yang dihadapi DPC PDI Perjuangan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan meliputi kondisi masyarakat yang masih patriarki, minimnya kemampuan dan pengalaman berpolitik, *money politic* dan keadaan finansial kaum perempuan yang masih lemah. 3) Upaya-upaya yang dilakukan DPC PDI Perjuangan untuk mengatasi kendala peningkatan partisipasi politik perempuan melalui penyadaran berpolitik bagi perempuan, pengkaderan perempuan-perempuan berpotensi sampai tingkat RW, dan penyediaan dana gotong royong.

Kata Kunci: *peranan, partai politik, DPC PDI Perjuangan, peningkatan, partisipasi politik perempuan.*

**THE ROLE OF POLITICAL PARTY TO INCREASE WOMEN'S
POLITICAL PARTICIPATION
(A Study in the Branch Executive Council of Indonesian Democratic
Party-Struggle of Yogyakarta City)**

By: Musarofah and Dr. Nasiwan, M.Si. / Citizenship Education and Law, Faculty of Social
Sciences,
State University of Yogyakarta
pelangimalam202@gmail.com

ABSTRACT

The research is aimed to describe: 1) the role of Indonesian Democratic Party-Struggle's branch executive council in increasing women's political-participation in Yogyakarta city; 2) the constrains faced of Indonesian Democratic Party-Strunggle's branch executive council in its way to augment women's participation in politic in Yogyakarta city, and 3) the efforts done by Indonesian Democratic Party-Strunggle's branch executive council to solve those problems.

The study is a descriptive research applying qualitative approach. The data are gathered by means of interview and documentation. The subjects of this research were selected through purposive sampling technique. They were Danang Rudiymoko (The chairman in the branch executive council of Indonesian Democratic Party-Strunggle), Darini (The deputy of woman and children division), Suryani (A legislative member representing Indonesian Democratic Party-Strunggle), Purwandari (A former legislative candidate from Indonesian Democratic Party-Strunggle), and Florentina Afra Suwartina (a female member of Indonesian Democratic Party-Strunggle). The data reliability was checked by means of cross check data. The data were analyzed through data finding, data reduction, data display, and conclusion drawing.

The result of this study shows: 1) Branch executive council of Indonesian Democratic Party-Strunggle attempts to rise women's participation in politic were done by the means of structural militant, discussions, leadership trainings, seminars, press-release-writing simulations, broadcasts, public speaking, door-stoop-interview trainings, press release, campaign trainings, and cooperation with both private organization and the government. 2) The constrains faced were including of the patriarchal culture in the society, the lack of political knowledge and experience, the practice of money politic, and the low-financial-level women have. 3) The efforts done to address the problems were applied through the awareness practice of women' political-involvement, cadres forming, and providing necessary fund.

Keywords: *role, political party, branch executive council of Indonesian Democratic Party-Struggle, increase, women's political-participation.*

PENDAHULUAN

Isu mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia politik merupakan isu yang masih terus diperbincangkan hingga berakhirnya pemilu legislatif tahun 2014. Pasalnya kebijakan mengenai kuota minimal 30% keterwakilan perempuan yang mulai digagas sejak tahun 2002 hingga saat ini masih juga belum dapat terpenuhi secara maksimal. Koran Tempo (Rabu, 4 Februari 2015, hlm. 24) memberitakan bahwa meskipun di Kota Yogyakarta jumlah keterwakilan perempuan mengalami peningkatan menjadi 25% dari pemilu sebelumnya yang hanya mampu mencapai 15%, akan tetapi tetap saja angka minimal kuota 30% keterwakilan perempuan masih belum dapat terpenuhi sesuai dengan target yang diamanahkan oleh undang-undang.

Persoalan masih belum terpenuhinya kebijakan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan di Kota Yogyakarta menjadi tanda bahwa partai politik masih kesulitan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menunjuk partai politik sebagai pihak yang harus ikut bertanggungjawab dan berperan langsung dalam usaha peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen.

Miriam Budiardjo (2008: 405-409) menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik dan sarana pengatur konflik. Berdasarkan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh partai politik diharapkan partai politik akan mampu membangun kesadaran politik perempuan sehingga terjadi peningkatan partisipasi politik

perempuan, khususnya di struktur lembaga politik formal. Akan tetapi, jika melihat kondisi yang ada di lapangan, partisipasi politik perempuan dianggap masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Partai politik masih dinilai cukup kesulitan dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, hal ini terbukti dari belum terpenuhinya kebijakan kuota tersebut secara penuh. Sehingga menjadi wajar apabila peranan partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan perlu dipertanyakan kembali.

Salah satu partai politik di Kota Yogyakarta yang peranannya perlu diteliti lebih jauh adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan). PDI Perjuangan menjadi menarik untuk diteliti berdasarkan pertimbangan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai pemenang pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Yogyakarta. PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu baru mampu mengantarkan satu orang wakil perempuannya untuk menempati kursi DPRD Kota Yogyakarta. Dari 14 daftar calon wakil perempuan diantara 24 daftar calon wakil laki-laki yang diajukan oleh PDI Perjuangan, baru terpilih satu orang wakil perempuan yang mampu bertahan dan kemudian terseleksi menjadi anggota legislatif perempuan di Kota Yogyakarta, sementara anggota laki-laki DPRD Kota Yogyakarta yang berhasil terpilih dari PDI Perjuangan berjumlah 14 orang.

Terdapatnya ketimpangan antara jumlah anggota legislatif laki-laki dan perempuan yang berasal dari PDI Perjuangan tentu menjadi sebuah catatan penting karena PDI Perjuangan sudah lebih dari 2 (dua) dekade dipimpin oleh ketua umum perempuan, namun hal tersebut belum diikuti dengan banyaknya jumlah kader perempuan PDI Perjuangan yang berhasil masuk di parlemen daerah

Kota Yogyakarta. Partai PDI Perjuangan yang dipimpin oleh ketua umum perempuan seharusnya lebih dapat diharapkan peranannya dalam usaha peningkatan partisipasi politik perempuan.

PDI Perjuangan adalah partai yang ikut mendukung terwujudnya kebijakan kuota keterwakilan perempuan, sebagai partai senior yang memiliki keterikatan sejarah dengan proses perumusan kebijakan kuota di masa lalu seharusnya PDI Perjuangan bisa lebih sensitif terhadap partisipasi politik kaum perempuan, akan tetapi jika melihat timpangnya jumlah kader antara laki-laki dan perempuan yang terpilih dan kecilnya jumlah perempuan anggota legislatif di Kota Yogyakarta maka menjadi wajar apabila peranan PDI Perjuangan dalam peningkatan partisipasi politik perempuan masih dipertanyakan dan perlu mendapat perhatian. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan sebuah penelitian tentang peranan DPC PDI Perjuangan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Yogyakarta .

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Agustus 2015 sampai dengan Februari 2016. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Danang Rudyatmoko selaku ketua DPC PDI Perjuangan, Darini selaku wakil ketua bidang perempuan dan anak, Suryani selaku anggota legislatif perempuan dari DPC PDI Perjuangan, Purwandari selaku calon anggota

legislatif yang tidak terpilih dalam pemilu legislatif 2014 dan Florentina Afra Suwartina selaku kader perempuan dari DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan *cross check data*. Teknik *cross check data* dilakukan dengan mengecek data yang berasal dari wawancara dengan dokumentasi. Berikutnya, *cross check* dilakukan untuk mengecek balik derajat kepercayaan data yang berasal dari wawancara dengan dokumentasi, serta membandingkan hasil wawancara antar subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data induktif. Langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, reduksi data, *display data* dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan DPC PDI Perjuangan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Yogyakarta

a. Militansi struktural

Tujuan dari militansi struktural adalah untuk menguatkan dan menyamakan ideologi agar struktur menjadi kuat dan solid. Materi-materi yang diberikan saat militansi struktural umumnya tentang loyalitas kepada partai, ajaran-ajaran politik Soekarno dan juga tentang ideologi yang dianut oleh PDI Perjuangan. Ramlan Surbakti (2007: 116-117) mengemukakan bahwa sosialisasi politik dalam pelaksanaannya dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik menurut Ramlan Surbakti adalah suatu proses dialogik antara pemberi dan

penerima pesan. Sementara indoktrinasi politik merupakan proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, simbol yang dianggap oleh pihak penguasa sebagai sesuatu yang ideal atau baik.

Jika mengacu pada pendapat yang telah dikemukakan oleh Ramlan Surbakti di atas, maka dapat disimpulkan bahwa militansi struktural yang dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan termasuk ke dalam bagian indoktrinasi politik karena dalam kegiatan militansi struktural proses komunikasi yang berlangsung antara penerima dan pemberi pesan adalah satu pihak dan tidak ada proses dialogik di dalamnya. Dilihat dari segi isi materi maka materi yang diberikan lebih banyak membahas mengenai apa yang menjadi kepentingan partai dan nilai-nilai yang dianggap benar oleh partai PDI Perjuangan itu sendiri. Militansi struktural yang telah dilaksanakan oleh DPC PDI Perjuangan bukan sebuah langkah yang seharusnya diambil untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan karena indoktrinasi politik bisa jadi adalah hal yang justru dapat menghambat kualitas partisipasi politik perempuan itu sendiri.

b. Diskusi

Tema diskusi yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta adalah tentang partai politik dan demokrasi. Materi diskusi berisi informasi yang berskala nasional dan proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara dialogik, ada proses timbal balik di dalamnya. Jika dilihat dari materi dan proses pelaksanaan diskusi maka kegiatan tersebut

termasuk sosialisasi politik yang dilakukan dengan melalui pendidikan politik.

c. Pelatihan kepemimpinan

Kegiatan pelatihan kepemimpinan seharusnya memang perlu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Yogyakarta. Pelatihan kepemimpinan yang telah diberikan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dapat menjadi jalan bagi para perempuan untuk mengembangkan keterampilan mereka di bidang politik.

d. Seminar

Seminar termasuk bagian dari pendidikan politik. Melalui pendidikan politik, para perempuan akan tahu mengenai isu-isu permasalahan perempuan dan tahu bagaimana cara memperjuangkan kepentingan kaum perempuan itu sendiri.

e. Simulasi menulis *press release*, undangan media/broadcast, public speaking, pelatihan *door stop interview*, *press conference*

Simulasi menulis *press release*, undangan media/broadcast, *public speaking*, pelatihan *door stop interview*, *press conference* dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dengan tujuan agar anggota-anggotanya dapat merepresentasikan dirinya baik secara tertulis maupun pembicaraan. Kegiatan-kegiatan seperti simulasi menulis *press release*, *public speaking*, pelatihan *door stop interview* dan *press conference* merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Ani Widayani Soetjipto (2005: 39-40) mengemukakan bahwa

untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan memang perlu diadakan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan kampanye, penyediaan informasi atau pun pelatihan keterampilan berpolitik. Simulasi menulis *press release*, *public speaking*, pelatihan *door stop interview* dan *press conference* termasuk ke dalam daftar kegiatan yang dapat digunakan untuk menunjang keterampilan berpolitik seorang politisi.

f. Pelatihan kampanye

Penyelenggaraan pelatihan kampanye bertujuan agar pada kader mempunyai keterampilan berpolitik serta teknik berorasi yang baik. Ani Widayani Soetjipto (2005: 39-40) mengemukakan bahwa kegiatan pelatihan kampanye merupakan hal yang penting untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Melalui pelatihan kampanye maka kaum perempuan dapat mempersiapkan diri ketika menghadapi massa dan punya keberanian ketika nantinya harus menyampaikan program-program kerjanya kepada masyarakat.

g. Bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat serta lembaga pemerintah

Pihak DPC PDI Perjuangan ikut menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pemerintah yang memang memiliki *concern* terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan di Kota Yogyakarta. Beberapa LSM yang menjalin kerjasama dengan DPC PDI Perjuangan dalam usaha meningkatkan partisipasi politik perempuan diantaranya yaitu *International Republican Institute* (IRI), Perkumpulan

Narasita, Mitra Wacana dan dari lembaga pemerintah yaitu Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM).

2. Kendala-kendala peningkatan partisipasi politik perempuan di Kota Yogyakarta

a. Kondisi masyarakat yang masih patriarki

Ani Widyani Soetjipto (2005: 142-143) mengemukakan bahwa struktur politik di Indonesia selama ini dibangun di atas jaringan yang sangat eksklusif dan didominasi oleh kaum laki-laki. Kepemimpinan dalam struktur politik banyak dimonopoli dan didominasi oleh kaum laki-laki sehingga kaum perempuan tersisihkan. Ani Widyani Soetjipto menyebutkan bahwa budaya patriarki yang telah mengakar kuat di masyarakat membawa dampak negatif yang besar bagi perkembangan partisipasi politik perempuan.

Kuatnya dominasi kaum laki-laki dapat dilihat dari dalam tubuh partai PDI Perjuangan itu sendiri. Masih didapati politisi laki-laki yang terkadang meremehkan kemampuan berpolitik kaum perempuan dan sikap partai yang masih abai terhadap cegatan dan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh politisi laki-laki terhadap politisi perempuan pada saat berlangsungnya pemilihan umum.

Masih terdapatnya budaya patriarki dapat dilihat juga dari adanya cap/label negatif yang disematkan oleh warga kepada kaum perempuan yang pulang malam karena harus menghadiri rapat partai. Masyarakat masih mencap negatif perempuan yang pulang larut malam dan memberi anggapan

positif kepada laki-laki sebagai pekerja keras apabila laki-laki bekerja hingga larut malam. Berdasarkan kaca mata jender kondisi tersebut di atas oleh Mansour Fakih (2008: 74) dikenal dengan istilah stereotipe/pelabelan negatif.

Bentuk lain dari adanya budaya patriarki di masyarakat juga dapat dilihat dari adanya kendala waktu dan beban ganda yang dialami oleh kaum perempuan yang terjun ke dunia politik. Jika kendala waktu dan beban ganda dianalisis menggunakan perspektif jender yang dikemukakan oleh Mansour Fakih (2008: 75) maka kendala tersebut di atas disebut sebagai *burden*. Mansour Fakih memberi pengertian *burden* sebagai bentuk ketidakadilan jender yang disebabkan karena peran jender perempuan yang digambarkan hanya berkutat pada urusan pekerjaan rumah tangga.

b. Minimnya kemampuan dan pengalaman berpolitik

Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya kemampuan dan pengalaman berpolitik perempuan adalah banyaknya kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, tingginya angka perempuan miskin, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, tingginya angka kematian ibu dan anak serta rendahnya akses pendidikan untuk perempuan. Ditinjau dari pandangan feminisme liberal maka dapat dikatakan bahwa minimnya kemampuan dan pengalaman berpolitik kaum perempuan merupakan bentuk keterbelakangan kaum perempuan yang akhirnya menyebabkan kaum perempuan tidak dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan khususnya berpartisipasi dalam bidang politik.

c. *Money politic* dan keadaan finansial kaum perempuan yang masih lemah

Money politic menyebabkan ongkos politik menjadi sedemikian mahal sehingga perempuan-perempuan dengan ekonomi lemah menjadi kesulitan ketika harus memasuki arena politik.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan untuk mengatasi kendala peningkatan partisipasi politik perempuan di Kota Yogyakarta

a. Penyadaran berpolitik bagi perempuan

Penyadaran berpolitik bagi perempuan dilakukan dengan berbagai kegiatan pelatihan keterampilan berpolitik. Melalui upaya penyadaran berpolitik diharapkan perempuan tidak akan menganggap bahwa politik itu adalah sesuatu yang kotor dan menyeramkan, sehingga setelah mengetahui tentang apa itu politik diharapkan kaum perempuan akan mempunyai kesadaran untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik.

b. Pengkaderan perempuan-perempuan berpotensi sampai tingkat RW

Pengkaderan perempuan-perempuan berpotensi dilakukan sampai tingkat RW. Diusahakan agar setiap 5 (dapil) yang ada di Kota Yogyakarta paling tidak harus ada minimal 30% perempuan yang ikut serta di dalamnya. Upaya pengkaderan yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan tersebut dapat dianggap masih belum cukup efektif untuk merekrut kader-kader perempuan yang berpotensi untuk terjun ke dunia politik. Perlu upaya yang lebih serius lagi dalam merekrut kader-kader yang berpotensi yang

mau terjun ke dunia politik seperti misalnya membangun basis jaringan dengan sebuah organisasi perempuan. Realitasnya di lapangan pihak PDI Perjuangan belum mampu membangun jaringan dengan sebuah organisasi yang memang memiliki *concern* terhadap perempuan.

c. Penyediaan dana gotong royong.

Dana gotong royong digunakan partai untuk ikut membantu membiayai proses politik, akan tetapi ternyata dana gotong royong ini belum sepenuhnya mampu mengatasi kendala lemahnya kondisi finansial yang masih lemah. Upaya penyediaan dana gotong royong belum merupakan upaya maksimal yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan untuk mengatasi kendala *money politic* dan keadaan finansial kaum perempuan yang masih lemah karena jika diperhatikan lebih jauh, sebenarnya faktor utama yang menyebabkan kaum perempuan dengan ekonomi lemah tidak dapat memasuki arena politik justru karena faktor masih maraknya praktik *money politic* di masyarakat. *Money politic* yang menjadikan ongkos sebuah proses politik menjadi sedemikian mahal. *Money politic* yang menjadi faktor utama dari masalah yang dihadapi oleh DPC PDI Perjuangan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan ternyata justru luput dari perhatian. DPC PDI Perjuangan belum memperhatikan bagaimana cara mengatasi kendala *money politic*. Jika DPC PDI Perjuangan mempunyai fokus untuk menyelesaikan masalah *money politic* bukan tidak mungkin tanpa menyediakan dana gotong royong pun seorang perempuan sudah mampu dengan sendirinya membiayai ongkos politik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Peranan DPC PDI Perjuangan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Yogyakarta melalui militansi struktural, diskusi, pelatihan kepemimpinan, seminar, simulasi menulis *press release*, *public speaking*, pelatihan *door stop interview*, *press conference*, pelatihan kampanye dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat serta lembaga pemerintah
2. DPC PDI Perjuangan menghadapi beberapa kendala dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Yogyakarta yaitu kondisi masyarakat yang masih patriarki, minimnya kemampuan dan pengalaman berpolitik, *money politic* dan keadaan finansial kaum perempuan yang masih lemah.
3. Upaya DPC PDI Perjuangan untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan peningkatan partisipasi politik perempuan di Kota Yogyakarta yaitu melalui penyadaran berpolitik bagi perempuan, pengkaderan perempuan-perempuan berpotensi sampai tingkat RW, dan penyediaan dana gotong royong.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Saran kepada partai politik (khususnya PDI Perjuangan)

Hendaknya partai dapat melakukan kontrol pengawasan terhadap pelaksanaan kuota 30% perempuan sehingga perempuan dapat bersaing

diselenggarakan. Hendaknya partai juga memiliki jejaring dan organisasi yang berperspektif perempuan agar dapat merekrut kader-kader perempuan yang berkompeten dan berkualitas.

2. Saran kepada pemerintah dan LSM-LSM

Hendaknya lebih memperkuat kerjasama dengan partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Ani Widyani Soetjipto. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Mansour Fakih. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ramlan Surbakti. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.